

MENJELAJAHI KESENJANGAN GENDER DALAM PENDIDIKAN: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SWEDIA DAN AFGHANISTAN

Labiba Sonia¹, Komarudin Sassi²

^{1,2}Islam Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah

Email: hidayatputra471@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Abstrak: Penelitian ini menjelajahi fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan di negara Swedia dan Afganistan sebagai masalah global yang memengaruhi akses, kualitas, dan hasil pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. Studi ini menganalisis perbandingan antara Swedia sebagai negara maju dengan kebijakan kesetaraan gender yang kuat, dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal akses pendidikan bagi perempuan. Metode yang digunakan melalui deskriptif-analitis dengan membandingkan pola dan strategi pendidikan di kedua negara tersebut, terutama fokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan berbasis gender. Hasil analisis diperoleh bahwa Swedia menunjukkan sistem pendidikan yang sangat inklusif dan berhasil mengeliminasi kesenjangan gender melalui kebijakan yang jelas dan efektif, tercermin dari tingginya tingkat literasi dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal. Sebaliknya, Afghanistan masih bergulat dengan hambatan sosial, politis, dan kultural yang menghalangi akses pendidikan perempuan, meskipun ada upaya peningkatan pasca-Taliban. Perbandingan strategi pendidikan di kedua negara tersebut menunjukkan bahwa Swedia telah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang adil, sementara Afghanistan menghadapi tantangan kompleks dalam penyediaan pendidikan yang setara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga refleksi dari dinamika sosial dan politik yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan pendidikan berbasis gender yang efektif serta dukungan internasional yang lebih intensif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan di negara-negara yang menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan Gender, Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Swedia, Afganistan.

Abstract: This study examines gender gaps in education as a global issue affecting access, quality, and outcomes for both girls and boys. The study compares Sweden, a developed country with strong gender equality policies, and Afghanistan, which still faces significant challenges in terms of girls' access to education. The study uses descriptive-analytical methods to compare education patterns and strategies in both countries, focusing on the implementation of inclusive and gender-based education policies. Sweden exhibits a highly inclusive education system that has successfully eliminated gender gaps through clear and effective policies, reflected in high levels of literacy and female participation in formal employment. In contrast, Afghanistan continues to grapple with social, political, and cultural barriers that hinder girls' access to education, despite post-Taliban improvements. The comparison of education strategies in both

countries shows that Sweden has succeeded in creating an equitable education system for all, while Afghanistan faces complex challenges in providing equal education. The results of this study reveal that gender gaps in education are not only a local issue, but also a reflection of broader social and political dynamics. Therefore, this study recommends the implementation of effective gender-based education policies and more intensive international support to improve access to education for girls in countries facing similar challenges.

Keywords: *Gender Inequality, Education, Education Policy, Sweden, Afghanistan.*

PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merupakan isu global yang sangat rumit, melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik, bahkan agama yang saling berkaitan (Safitri et al., 2021). Masalah ini berdampak langsung pada akses, kualitas, serta hasil pendidikan yang dapat dicapai oleh laki-laki dan perempuan, terlebih secara langsung dirasakan oleh kelompok perempuan. Ketidakadilan gender dalam pendidikan sering kali menciptakan hambatan besar bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka dalam kehidupan profesional dan sosial. Konsekuensi kesenjangan gender ini bukan hanya berdampak pada individu perempuan yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara (Zaitun Qamariah, 2024).

Di banyak negara, perempuan masih menghadapi berbagai rintangan struktural yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan. Meskipun beberapa negara telah menerapkan kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan ini, tantangan tersebut tetap ada, terutama di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, atau situasi sosial. Misalnya, di wilayah-wilayah yang dilanda perang, infrastruktur pendidikan sering kali rusak, dan dalam situasi seperti itu, perempuan cenderung menjadi kelompok yang paling terdampak karena prioritas keluarga lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki dalam hal pendidikan (Guo et al., 2022).

Selain itu, norma sosial, begitu juga norma agama dirasakan masih kuat membatasi peran perempuan dalam masyarakat dan negara turut serta memperparah masalah ini. Di banyak budaya, perempuan dianggap lebih baik menjalankan peran domestik daripada mengejar

pendidikan atau karier profesional. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali dipaksa meninggalkan pendidikan lebih awal untuk menikah, mengurus rumah tangga, atau membantu ekonomi keluarga melalui pekerjaan informal. Akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal di bidang profesional, yang kemudian memperburuk ketimpangan gender di pasar tenaga kerja (Moh Rosyid, 2021).

Meskipun berbagai negara telah mencoba mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif dan program-program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, tantangan-tantangan tersebut tetap mendalam dan memerlukan solusi jangka panjang. Upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pendidikan semata, tetapi juga memerlukan reformasi yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan budaya (Damanik & Saliman, 2024). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan juga terkait dengan norma dan nilai-nilai agama yang dianut dalam masyarakat. Beberapa pandangan agama, apabila diterapkan secara inklusif dan progresif, dapat mendukung kesetaraan gender dengan mendorong pendidikan bagi semua individu, termasuk perempuan. Misalnya, dalam Islam, terdapat ajaran yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan (Damanik & Saliman, 2024; Hasan & Hidayat, 2023). Dukungan dari pemuka agama dan lembaga keagamaan dalam mengadvokasi pendidikan yang setara dapat membantu mengatasi hambatan budaya dan sosial yang masih membatasi perempuan dalam mengakses pendidikan (Moh Rosyid, 2021).

Pendidikan secara global memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kesetaraan gender. Melalui akses yang setara terhadap pendidikan, perempuan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pasar tenaga kerja, pembuatan kebijakan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitasnya. Pendidikan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi pemimpin, inovator, dan pengambil keputusan di berbagai bidang (Damanik & Saliman, 2024). Namun, di banyak negara berkembang, masih terdapat hambatan-hambatan struktural dan kultural yang secara signifikan menghalangi perempuan dalam memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan.

Kendala-kendala ini meliputi tradisi patriarki, diskriminasi gender, kemiskinan, dan kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai (Novitasari & Lestari, 2023)

Selain itu, di beberapa wilayah, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta kondisi ekonomi yang lemah semakin memperburuk ketimpangan gender dalam pendidikan. Misalnya, dalam masyarakat dengan pendapatan rendah, keluarga sering kali harus membuat pilihan sulit antara menyekolahkan anak laki-laki atau anak perempuan, dan dalam banyak kasus, anak laki-laki lebih diprioritaskan. Akibat dari kebijakan yang tidak memadai ini, banyak perempuan tertinggal dalam pendidikan formal, sehingga tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal (Ho et al., 2020). Kurangnya akses ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, tetapi juga membatasi kontribusi mereka terhadap masyarakat secara lebih luas. Ketika perempuan tidak memiliki pendidikan yang cukup, mereka cenderung terkunci dalam pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi dan dengan upah rendah, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Kesetaraan gender telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan nasional, termasuk dalam sektor pendidikan. Swedia telah lama dikenal sebagai salah satu negara yang paling progresif dalam mempromosikan kesetaraan gender, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan (Tjalau et al., 2023). Pemerintah Swedia, melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang dengan hati-hati, telah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, kebijakan pendidikan di Swedia juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang di dunia profesional dan di sektor formal, terutama di bidang-bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki (Dessy et al., 2023).

Salah satu indikator utama keberhasilan Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan adalah tingginya tingkat literasi di kalangan perempuan. Perempuan di Swedia tidak hanya memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dasar, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan tinggi, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Partisipasi perempuan di sektor-sektor ini merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat bidang STEM sering kali dianggap sebagai domain laki-laki di banyak negara lain. Keberhasilan Swedia dalam mendorong perempuan untuk mengejar karier

di bidang-bidang ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang inklusif dapat membantu mengatasi hambatan struktural yang sering kali menghalangi perempuan di negara lain (Setyawan, 2019).

Keberhasilan Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender, terutama dalam pendidikan, telah menjadikannya sebagai model global yang banyak dipuji. Negara ini berhasil menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berpartisipasi dalam dunia kerja dapat diatasi (Setyawan, 2019). Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan di seluruh dunia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, pengalaman Swedia dapat menjadi inspirasi bagi negara lain dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk semua (Svensson, 2024).

Sebaliknya, Afghanistan merupakan salah satu contoh negara di mana kesetaraan gender dalam pendidikan menghadapi tantangan yang sangat serius dan kompleks. Selama beberapa dekade, negara ini dilanda konflik internal yang berkepanjangan, ketidakstabilan politik, serta pengaruh kuat ideologi patriarki, yang bersama-sama telah menciptakan lingkungan sosial di mana perempuan sering kali dihadapkan pada pembatasan ekstrem dalam mengakses pendidikan. Pada masa pemerintahan Taliban, situasi ini mencapai puncaknya, ketika perempuan hampir sepenuhnya dilarang untuk mendapatkan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Aturan-aturan yang diterapkan selama era Taliban benar-benar membatasi hak perempuan untuk belajar, sehingga menyebabkan penurunan drastis dalam angka partisipasi pendidikan perempuan dan memperkuat ketimpangan gender di negara tersebut (Svensson, 2024).

Setelah kejatuhan rezim Taliban, meskipun ada sejumlah upaya untuk memperbaiki situasi, akses perempuan terhadap pendidikan masih jauh dari ideal. Banyak tantangan struktural yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu tantangan terbesar adalah norma-norma sosial yang sangat konservatif dan masih mendominasi banyak bagian masyarakat Afghanistan. Norma-norma ini sering kali membatasi peran perempuan di ruang publik dan membatasi kebebasan mereka untuk mengakses fasilitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan di mana budaya patriarki sangat kuat. Dalam

masyarakat yang konservatif, pendidikan bagi anak perempuan masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting atau bahkan tidak diinginkan, yang menyebabkan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap pendidikan perempuan (Olczyk et al., 2023).

Di samping itu, infrastruktur pendidikan di Afghanistan juga menjadi masalah serius yang memperburuk kesenjangan gender dalam pendidikan. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang layak, terutama sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Di beberapa wilayah, bahkan tidak ada sekolah khusus untuk anak perempuan, sehingga memaksa mereka untuk tinggal di rumah atau mencari pendidikan di tempat yang jauh dengan risiko keamanan yang tinggi. Ketidacukupan tenaga pengajar perempuan juga menjadi penghalang, karena dalam masyarakat yang konservatif, banyak keluarga yang enggan mengizinkan anak perempuan mereka diajar oleh guru laki-laki (Svensson, 2024).

Situasi ini semakin diperburuk oleh kondisi politik yang tidak stabil dan konflik yang berkelanjutan di Afghanistan. Konflik-konflik yang terjadi tidak hanya menghancurkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman, di mana perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan intimidasi. Serangan terhadap sekolah, terutama yang melayani perempuan, telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keamanan pendidikan di negara ini. Dalam situasi di mana keamanan dasar tidak dapat dijamin, banyak keluarga merasa enggan atau takut untuk mengirimkan anak perempuan mereka ke sekolah, meskipun ada beberapa peluang pendidikan yang tersedia (Svensson, 2024)

Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dan komunitas internasional dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan juga memperburuk masalah ini. Meskipun ada upaya dari pemerintah Afghanistan pasca-Taliban untuk membuka kembali akses pendidikan bagi perempuan, tantangan yang dihadapi begitu kompleks sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. Dukungan finansial dan infrastruktur dari pihak luar sering kali tidak memadai untuk menutupi kebutuhan yang sangat besar dalam memperbaiki sektor pendidikan di Afghanistan. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana pendidikan perempuan tetap terpinggirkan, sementara faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan gender terus berlanjut (Svensson, 2024).

Secara keseluruhan, situasi di Afghanistan mencerminkan bagaimana interaksi antara faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang rumit dapat memperburuk ketimpangan gender

dalam pendidikan. Meskipun ada upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi, seperti program-program yang didukung oleh komunitas internasional dan beberapa kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Afghanistan bukan hanya tentang kurangnya fasilitas fisik, tetapi juga tentang mengubah norma-norma sosial yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun dan mengatasi tantangan keamanan yang terus menghantui negara tersebut.

Perbandingan antara Swedia dan Afghanistan dalam hal kesetaraan gender dalam pendidikan. Dan menunjukkan perbedaan mencolok yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan kultural di kedua negara. Di Swedia, kesetaraan gender bukan hanya menjadi bagian dari kebijakan pendidikan, tetapi juga telah terintegrasi ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Swedia memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kebijakan ini tidak hanya mendorong perempuan untuk mengakses pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan agar mereka dapat mengejar karier profesional yang setara dengan laki-laki. Dengan sistem pendidikan yang inklusif dan fokus pada kesetaraan, perempuan di Swedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di dunia akademis maupun dalam pasar tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam peluang pendidikan antara perempuan dan laki-laki, serta mendukung perempuan dalam mencapai potensi maksimal mereka di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) (Olczyk et al., 2023).

Sebaliknya, situasi di Afghanistan sangat berbeda dan jauh lebih rumit. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam akses pendidikan bagi perempuan setelah jatuhnya rezim Taliban, perempuan di Afghanistan masih dihadapkan pada serangkaian hambatan besar yang membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan. Hambatan ini berakar dalam pada norma-norma sosial yang sangat konservatif dan patriarkal, yang mendominasi banyak bagian dari masyarakat Afghanistan, terutama di daerah pedesaan. Dalam budaya yang kental dengan patriarki ini, perempuan sering kali dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan formal, dan lebih diharapkan untuk berperan dalam tugas-tugas domestik. Akibatnya, banyak keluarga yang enggan atau bahkan menolak untuk mengirim anak perempuan mereka ke sekolah, karena

pendidikan bagi perempuan dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku (Dessy et al., 2023).

Selain norma-norma sosial yang menghalangi pendidikan perempuan, Afghanistan juga menghadapi masalah ketidakstabilan politik dan keamanan yang serius. Konflik yang terus berlangsung dan ketidakamanan di banyak wilayah negara ini telah menghancurkan infrastruktur pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang seharusnya melayani anak-anak perempuan. Banyak sekolah dihancurkan atau ditutup karena ancaman serangan dari kelompok-kelompok militan, yang sering kali menargetkan institusi pendidikan yang menerima perempuan. Ketidakstabilan ini menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, karena ancaman kekerasan dan intimidasi menjadi penghalang utama bagi keluarga untuk mengizinkan anak perempuan mereka belajar (Dessy et al., 2023)

Di sisi lain, kebijakan yang diterapkan pemerintah Afghanistan juga belum sepenuhnya mendukung pendidikan perempuan secara efektif. Meskipun ada beberapa inisiatif untuk memperluas akses pendidikan bagi perempuan, implementasi kebijakan ini sering kali tidak berjalan lancar karena kurangnya infrastruktur, minimnya sumber daya, serta keterbatasan dukungan dari masyarakat luas. Sekolah-sekolah di Afghanistan, terutama di wilayah pedesaan, sering kali kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang layak, guru yang terlatih, dan material pendidikan yang memadai. Kekurangan ini semakin memperburuk kondisi pendidikan perempuan, karena sekolah-sekolah yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak perempuan dengan baik (Lomotey et al., 2023).

Secara keseluruhan, kontras yang terlihat antara Swedia dan Afghanistan dalam hal kesetaraan gender dalam pendidikan mencerminkan bagaimana konteks sosial, politik, kultural, dan juga agama dapat mempengaruhi peluang pendidikan bagi perempuan. Swedia, yang mayoritas penduduknya menganut Kristen (khususnya Lutheran), memiliki pendekatan yang lebih sekuler dalam kebijakan publik dan pendidikan, sehingga nilai-nilai agama tidak secara langsung membatasi peran perempuan di bidang pendidikan. Sebaliknya, Afghanistan, dengan mayoritas penduduknya menganut Islam, memiliki kebijakan dan pandangan sosial yang sering kali lebih konservatif. Interpretasi nilai-nilai agama di Afghanistan, terutama dalam konteks pendidikan, dapat memperkuat norma-norma yang membatasi akses pendidikan

bagi perempuan, meskipun terdapat ajaran dalam Islam yang mendukung pentingnya pendidikan bagi semua umat (Lomotey et al., 2023).

Swedia, dengan komitmen kuat terhadap kesetaraan gender dan sistem pendidikan yang maju, telah berhasil menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat berkembang dan meraih kesuksesan di berbagai bidang. Sebaliknya, Afghanistan masih harus berjuang melawan hambatan yang kompleks dan mendalam yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, mulai dari norma-norma sosial yang konservatif hingga ketidakstabilan politik yang terus berlanjut. Kedua negara ini memberikan contoh yang sangat berbeda tentang bagaimana kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai atau dihambat oleh berbagai faktor struktural yang ada di masyarakat (Lomotey et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan memahami kesenjangan gender dalam pendidikan melalui perbandingan antara Swedia dan Afghanistan, dua negara yang mewakili dua ekstrem dalam hal pendekatan terhadap kesetaraan gender dan akses pendidikan bagi perempuan. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan berbasis gender diimplementasikan di kedua negara, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memengaruhi akses dan hasil pendidikan bagi perempuan. Analisis ini akan mencakup tinjauan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada terciptanya kesenjangan gender dalam pendidikan, baik di Swedia maupun di Afghanistan, dengan fokus pada kebijakan publik, kondisi sosial, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan.

Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai dan dipertahankan, serta tantangan-tantangan apa yang perlu diatasi oleh negara-negara yang masih berjuang untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran komunitas internasional dalam mendukung negara-negara seperti Afghanistan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial, politik, dan kultural yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan masyarakat internasional dalam upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua gender

KERANGKA TEORITIS

a. *Teori Gender dalam Pendidikan*

Teori gender menyoroti bagaimana peran, tanggung jawab, dan harapan terhadap perempuan dan laki-laki tidak hanya terbentuk secara biologis tetapi lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya (Azizah, 2021). Dalam konteks pendidikan, teori ini menjelaskan bagaimana *stereotip gender* dan norma patriarkal sering kali menciptakan hambatan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan kerap kali dihadapkan pada kendala yang membatasi mereka dari mengakses pendidikan yang setara, sementara pendidikan itu sendiri juga berperan dalam mereproduksi atau, dalam beberapa kasus, menantang norma-norma sosial terkait peran gender (Barra et al., 2024).

Norma sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Afghanistan tidak hanya didorong oleh ekspektasi peran domestik perempuan tetapi juga diperkuat oleh faktor budaya, agama, dan sejarah konflik berkepanjangan. Di Afghanistan, norma budaya yang sangat patriarkal serta interpretasi konservatif terhadap nilai-nilai agama sering kali membatasi peran perempuan di ruang publik, termasuk dalam akses mereka terhadap pendidikan formal. Ajaran-agaran agama yang sebenarnya mendorong pencarian ilmu oleh setiap muslim sering kali diinterpretasikan dalam kerangka budaya yang konservatif, sehingga perempuan lebih diorientasikan pada peran domestik. Selain itu, peperangan yang berkepanjangan di negara tersebut telah memperburuk kondisi ini, di mana aspek keamanan dan stabilitas ekonomi turut menghalangi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan secara setara. Di daerah-daerah tersebut, tradisi konservatif membatasi peran perempuan, memperkuat gagasan bahwa perempuan lebih cocok untuk urusan rumah tangga daripada pendidikan formal atau pekerjaan di sektor publik (Barra et al., 2024).

Sebaliknya, negara seperti Swedia telah berhasil mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender secara komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya memastikan perempuan dapat mengakses pendidikan secara setara, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dan setara dalam berbagai sektor masyarakat, termasuk pasar tenaga kerja dan bidang profesional yang selama ini didominasi laki-laki. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang inklusif dapat mengubah persepsi dan norma-norma sosial terkait gender, membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang secara maksimal dalam pendidikan dan kehidupan publik (Palomares-Ruiz et al., 2021).

b. Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Pendidikan

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merujuk pada adanya perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses ke pendidikan, tingkat partisipasi, dan pencapaian hasil. Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada kuantitas, tetapi juga kualitas kesempatan yang diberikan kepada perempuan dalam memperoleh pendidikan. Ketidaksetaraan ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk diskriminasi yang mungkin tidak selalu tampak secara langsung tetapi tersembunyi dalam struktur sosial dan budaya yang mengakar. Diskriminasi tersebut sering kali muncul melalui norma-norma sosial yang secara tidak langsung memperkuat stereotip gender dan membatasi peran perempuan di ruang publik, termasuk dalam pendidikan dan dunia kerja (Meoli et al., 2024).

Salah satu bentuk diskriminasi gender dalam pendidikan adalah keterbatasan akses bagi perempuan, yang sering kali terlihat dalam rendahnya tingkat partisipasi perempuan di berbagai jenjang pendidikan. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah dengan adat istiadat yang melarang atau membatasi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketidaksetaraan gender juga terlihat dalam terbatasnya peluang perempuan untuk mengejar karier di bidang tertentu, terutama di sektor yang dianggap "maskulin" seperti ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Di banyak negara, perempuan menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk memasuki atau sukses dalam bidang ini, yang sering kali dianggap sebagai domain laki-laki (Meoli et al., 2024).

Contoh nyata ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat ditemukan di Afghanistan, di mana akses perempuan terhadap pendidikan dasar dan menengah sangat terbatas, terutama di bawah pemerintahan yang memberlakukan kebijakan konservatif yang mengekang peran perempuan di masyarakat. Perempuan sering kali dihadapkan pada larangan untuk bersekolah atau menghadapi situasi di mana keamanan dan fasilitas pendidikan tidak mendukung partisipasi mereka, khususnya di daerah pedesaan. Ketidaksetaraan ini diperparah oleh norma-norma sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam peran domestik, yang pada gilirannya menghalangi mereka dari kesempatan untuk mengembangkan potensi melalui pendidikan (Shamimi & Rijal, 2022).

Sebaliknya, di negara-negara maju seperti Swedia, upaya yang berkelanjutan dalam mempromosikan kesetaraan gender telah berhasil secara signifikan mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan. Kebijakan pemerintah yang progresif dan mendukung kesetaraan

telah memberikan perempuan akses yang sama dengan laki-laki di semua jenjang pendidikan. Perempuan di Swedia tidak hanya memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang studi, termasuk STEM. Kesetaraan gender yang ditanamkan dalam kebijakan pendidikan di Swedia memungkinkan perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai sektor dan memberikan mereka peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis dan profesional, sesuatu yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara berkembang seperti Afghanistan (Meoli et al., 2024).

c. Faktor Struktural yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender dalam Pendidikan

Faktor sosial-budaya memainkan peran penting dalam memperkuat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Di masyarakat yang patriarkal seperti Afghanistan, perempuan sering kali dibatasi oleh peran gender tradisional yang menekankan pentingnya peran mereka di rumah tangga, yang mengurangi pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi akses pendidikan bagi perempuan. Di negara-negara seperti Afghanistan, kebijakan yang diberlakukan oleh rezim konservatif dapat melarang perempuan untuk bersekolah, seperti yang terjadi selama pemerintahan Taliban. Sebaliknya, di Swedia, kebijakan pemerintah yang inklusif memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas (Ho et al., 2020).

Faktor ekonomi juga berperan dalam menciptakan kesenjangan gender. Keluarga yang berpenghasilan rendah sering kali dihadapkan pada pilihan sulit dalam menyekolahkan anak-anak mereka, dan dalam banyak kasus, anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Hal ini terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Afghanistan. Kondisi keamanan yang buruk di daerah-daerah konflik sering kali menghalangi perempuan untuk bersekolah. Ancaman kekerasan, serangan, dan ketidakstabilan politik di Afghanistan membuat banyak perempuan enggan atau tidak mampu melanjutkan pendidikan, terutama di daerah pedesaan yang terpencil (Ho et al., 2020).

d. Analisis Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan yang inklusif, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender, adalah langkah kunci dalam mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan. Di negara-

negara seperti Swedia, undang-undang dan kebijakan telah dirancang untuk menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki di semua tingkat pendidikan. Selain itu, Swedia juga memiliki program-program yang mendorong partisipasi perempuan di sektor STEM, yang secara historis didominasi oleh laki-laki. Sementara di Afghanistan, meskipun ada beberapa upaya reformasi kebijakan, faktor politik, sosial, dan kultural tetap menjadi penghalang utama bagi kemajuan pendidikan perempuan (Ho et al., 2020)

Keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan yang inklusif sangat bergantung pada konteks sosial dan politik masing-masing negara. Di Afghanistan, ketidakstabilan politik, pengaruh norma-norma sosial yang konservatif, dan lemahnya dukungan pemerintah terhadap kesetaraan gender telah memperparah masalah ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Sebaliknya, di Swedia, stabilitas politik dan komitmen terhadap kesetaraan gender telah menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan inklusif.

e. Pengaruh Kultural dalam Akses Pendidikan

Patriarki yang mendominasi budaya di banyak negara berkembang, seperti Afghanistan, menjadi penghalang besar bagi akses pendidikan perempuan. Budaya patriarkal sering kali menempatkan perempuan dalam peran domestik dan membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan ketika perempuan diizinkan untuk bersekolah, harapan sosial yang kuat dapat membatasi pilihan mereka di bidang studi tertentu, menjauhkan mereka dari bidang yang lebih diakui secara profesional, seperti STEM (Kentmen-Cin et al., 2024).
[ini mantap]

Di negara berkembang seperti Afghanistan, pendidikan sering kali dianggap lebih penting untuk anak laki-laki, sementara perempuan didorong untuk fokus pada peran domestik. Sebaliknya, Swedia menampilkan contoh di mana perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara ke pendidikan di semua tingkatan (Kentmen-Cin et al., 2024).

f. Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Inklusif Berbasis Gender

Swedia adalah contoh sukses dalam penerapan kebijakan pendidikan berbasis gender yang inklusif. Kebijakan ini memungkinkan perempuan untuk memiliki akses yang setara di semua jenjang pendidikan, serta mendukung mereka dalam memasuki bidang-bidang yang

dulunya didominasi oleh laki-laki, seperti STEM. Selain itu, Swedia juga memiliki berbagai program untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan pasar kerja formal (Guo et al., 2022).

Meskipun ada upaya reformasi pendidikan di Afghanistan, banyak hambatan yang menghalangi implementasi kebijakan yang inklusif bagi perempuan. Hambatan ini termasuk kekuatan sosial, budaya, dan politik yang membatasi akses perempuan ke pendidikan, terutama di daerah pedesaan yang masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma konservatif (Guo et al., 2022).

g. Dampak dari Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan membawa dampak yang sangat besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Ketika perempuan tidak memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan, mereka sering kali tersisih dari pasar kerja formal, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara maksimal terhadap ekonomi nasional. Keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi individu perempuan, tetapi juga mengurangi potensi produktivitas dan inovasi yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Kehilangan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil dari kalangan perempuan berarti banyak negara tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kapasitas mereka untuk bersaing di pasar global (Plaza-Angulo & López-Toro, 2024).

Lebih lanjut, ketidaksetaraan akses pendidikan perempuan juga memperburuk siklus kemiskinan di masyarakat. Tanpa pendidikan yang layak, perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah, informal, atau pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan, sehingga membatasi peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan keluarganya (Guo et al., 2022). Kondisi ini memperkuat kemiskinan lintas generasi, di mana anak-anak dari keluarga yang kurang berpendidikan juga sering menghadapi hambatan untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa akses pendidikan yang merata, perempuan dan generasi berikutnya sulit mencapai mobilitas sosial yang dapat memperbaiki taraf hidup, sehingga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, memperluas akses pendidikan bagi perempuan tidak hanya menjadi kunci untuk memperbaiki kesetaraan gender, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mengurangi kemiskinan di tingkat masyarakat dan negara (Plaza-Angulo & López-Toro, 2024).

h. Studi Perbandingan: Swedia dan Afghanistan

Swedia adalah salah satu negara maju yang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan gender yang sangat tinggi dalam bidang pendidikan. Dengan menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbagai program yang mendorong keterlibatan aktif perempuan di semua bidang studi, Swedia telah menciptakan sistem pendidikan yang adil dan setara bagi semua gender. Pencapaian ini tidak hanya terlihat dalam jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi, tetapi juga dalam tingginya partisipasi perempuan di pasar kerja formal, termasuk di sektor-sektor yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) (Wu et al., 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dapat secara signifikan mengubah dinamika sosial dan ekonomi suatu negara, dengan memberdayakan perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat.

i. Kontribusi Internasional dalam Pengurangan Kesenjangan Gender

Komunitas internasional memegang peran krusial dalam mendukung negara-negara berkembang untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Melalui berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan keuangan, reformasi kebijakan, dan inisiatif pendidikan inklusif, organisasi internasional dan badan-badan global telah membantu memperbaiki situasi di negara-negara yang masih menghadapi ketidaksetaraan pendidikan, termasuk Afghanistan. Bantuan finansial sering digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, menyediakan beasiswa bagi perempuan, dan mendukung program-program yang dirancang khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Selain itu, badan-badan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UNESCO, mendorong reformasi kebijakan di tingkat nasional untuk memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang (Damanik & Saliman, 2024).

Namun, meskipun dukungan internasional ini berperan penting dalam meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, tantangan struktural dan budaya yang mendalam masih sering menghambat kemajuan signifikan. Di banyak negara berkembang, khususnya yang memiliki norma-norma patriarkal yang kuat, upaya internasional sering kali berhadapan dengan hambatan sosial dan budaya yang sulit diubah dalam waktu singkat. Misalnya, di Afghanistan, meskipun ada bantuan dari komunitas internasional untuk memperluas akses pendidikan bagi perempuan, tradisi konservatif yang mengakar, peran gender yang kaku, serta situasi politik

yang tidak stabil sering kali memperlambat penerapan kebijakan pendidikan yang inklusif. Ketidakamanan dan konflik juga menjadi penghalang signifikan bagi perempuan untuk mengakses sekolah, terutama di daerah pedesaan yang lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi (Moh Rosyid, 2021).

Dalam konteks ini, peran komunitas internasional tidak hanya terbatas pada penyediaan bantuan finansial atau teknis, tetapi juga mencakup upaya untuk bekerja sama dengan pemerintah lokal dan masyarakat setempat dalam mengubah persepsi budaya tentang peran perempuan dalam pendidikan. Dengan strategi yang komprehensif, yang mencakup pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan sosial, komunitas internasional dapat mendukung negara-negara berkembang dalam mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender dalam pendidikan, meskipun tantangan struktural dan budaya tetap menjadi kendala utama yang harus diatasi secara berkelanjutan (Moh Rosyid, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan utama penelitian ini adalah membandingkan kesenjangan gender dalam pendidikan antara dua negara yang memiliki perbedaan signifikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, yaitu Swedia dan Afghanistan. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai kebijakan pendidikan berbasis gender yang diterapkan di kedua negara tersebut. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan gender dalam pendidikan, serta menilai efektivitas kebijakan pendidikan Swedia dalam mengatasi masalah tersebut. Sebaliknya, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan struktural, sosial, dan politik yang menghambat kemajuan Afghanistan dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi yang mencakup kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen yang relevan. Sumber-sumber utama yang dianalisis meliputi artikel-artikel ilmiah, laporan resmi dari pemerintah Swedia dan Afghanistan, serta publikasi dari lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan Bank Dunia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari jurnal-jurnal akademik, buku-buku yang membahas isu gender dan pendidikan, serta laporan penelitian terkait kebijakan pendidikan berbasis gender di kedua negara. Analisis literatur ini bertujuan

untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kesenjangan gender dalam pendidikan di berbagai tingkatan pendidikan di Swedia dan Afghanistan.

Objek penelitian ini mencakup sistem pendidikan di Swedia dan Afghanistan, dengan fokus utama pada kesenjangan gender dalam hal akses, partisipasi, dan hasil pendidikan. Penelitian ini mengkaji kebijakan pendidikan berbasis gender, serta akses perempuan ke pendidikan formal di berbagai tingkatan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam hal ini, Swedia dianalisis sebagai contoh negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan gender secara signifikan, sementara Afghanistan dianalisis sebagai negara yang masih berjuang menghadapi tantangan besar dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan. Fokus utama adalah untuk melihat bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik di masing-masing negara mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan berbasis gender tersebut.

Penelitian ini menganalisis lima elemen kunci yang mempengaruhi kesenjangan gender dalam pendidikan, yaitu: (1) kebijakan pendidikan berbasis gender di kedua negara, khususnya kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, (2) peran sosial dan politik dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, (3) tingkat akses dan partisipasi perempuan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, (4) pengaruh budaya, adat, dan norma sosial terhadap persepsi masyarakat terkait peran perempuan dalam pendidikan, serta (5) hasil pendidikan dalam hal kontribusi perempuan di pasar kerja formal dan dampak ekonomi yang lebih luas. Setiap elemen ini dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan dan konteks sosial mempengaruhi kesenjangan gender dalam pendidikan di kedua negara.

Penelitian ini menganalisis perbedaan implementasi kebijakan pendidikan berbasis gender antara Swedia dan Afghanistan melalui perbandingan sistematis terhadap teori, konsep, dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara. Swedia dipandang sebagai model keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif yang efektif mengurangi kesenjangan gender, memungkinkan perempuan berpartisipasi setara dalam pendidikan dan meningkatkan keterlibatan mereka di pasar kerja formal. Sebaliknya, Afghanistan menghadapi tantangan besar yang menghambat kemajuan pendidikan perempuan, termasuk hambatan budaya, agama, politik, dan sosial yang kuat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi dampak

kebijakan pendidikan terhadap partisipasi perempuan dalam pasar kerja formal di Afghanistan serta menyoroti peran lembaga internasional dalam mendukung reformasi pendidikan untuk mendorong kesetaraan gender di negara tersebut.

Melalui pendekatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan gender dalam pendidikan di Swedia dan Afghanistan. Dengan membandingkan kedua negara yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang sangat berbeda, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dengan Afghanistan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis gender. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu mempercepat pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan, serta memperkuat dukungan internasional bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi kesulitan dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Hasil penelitian ini juga akan memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan

Analisis data mengungkapkan adanya perbedaan mencolok dalam tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan antara Swedia dan Afghanistan. Berdasarkan statistik terbaru, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar di Swedia mencapai angka yang luar biasa, yakni 99%. Angka ini menunjukkan konsistensi yang tinggi, yang juga terlihat pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Di perguruan tinggi, perempuan bahkan menyumbang lebih dari 50% dari total jumlah mahasiswa, yang mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan Swedia. Sistem ini sangat menekankan prinsip inklusivitas dan kesetaraan, sehingga perempuan memiliki akses yang luas terhadap pendidikan berkualitas (Novitasari & Lestari, 2023).

Sebaliknya, kondisi di Afghanistan jauh berbeda dan lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar hanya mencapai sekitar 60%, yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang signifikan. Ketika kita menganalisis lebih dalam, kita menemukan bahwa partisipasi perempuan pada tingkat pendidikan menengah menurun

secara drastis, mencapai hanya sekitar 35%. Pada tingkat perguruan tinggi, situasinya bahkan lebih mencengangkan, dengan angka partisipasi perempuan yang hanya berkisar sekitar 15% (Ho et al., 2020). Ketidaksetaraan ini mencerminkan berbagai tantangan kompleks yang dihadapi perempuan di Afghanistan, termasuk hambatan budaya yang kaku, norma sosial yang membatasi, dan kebijakan pendidikan yang tidak mendukung. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian dan upaya reformasi yang serius untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan di Afghanistan (Novitasari & Lestari, 2023)

Hambatan yang Dihadapi Perempuan di Afghanistan

Perempuan di Afghanistan menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan yang menghalangi akses mereka terhadap pendidikan, yang sangat mempengaruhi perkembangan dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kondisi ini adalah pengaruh budaya yang masih mendalam. Tradisi patriarkal yang kuat di banyak komunitas Afghanistan sering kali memandang pendidikan bagi perempuan sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan berpotensi berbahaya. Dalam banyak kasus, keluarga-keluarga lebih memilih untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam pendidikan anak laki-laki, sementara anak perempuan diharapkan untuk tetap di rumah dan mengurus tugas-tugas domestik. Pandangan ini menciptakan stigma yang menghambat perempuan dari mengejar pendidikan, dan mengakar kuat dalam struktur sosial yang ada (Putri et al., 2024).

Selain faktor budaya, isu keamanan juga menjadi tantangan yang sangat kritis dan tidak dapat diabaikan. Konflik berkepanjangan di Afghanistan, ditambah dengan ancaman kekerasan yang nyata terhadap perempuan yang bersekolah, menciptakan suasana ketidakamanan yang meresahkan. Banyak orang tua merasa ragu untuk mengizinkan anak perempuan mereka pergi ke sekolah karena risiko yang mengancam keselamatan mereka, termasuk ancaman serangan dari kelompok bersenjata dan pelecehan di sepanjang perjalanan menuju sekolah. Ketidakpastian ini menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan (Putri et al., 2024).

Situasi ini diperburuk lagi oleh kebijakan pemerintah yang sering kali bersifat diskriminatif. Meskipun terdapat beberapa upaya reformasi pendidikan pasca-rezim Taliban, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Regulasi yang tidak mendukung, seperti larangan yang menghalangi perempuan dari mendapatkan pendidikan tinggi atau keterbatasan akses ke pendidikan formal, tetap menjadi penghalang serius. Infrastruktur pendidikan yang kurang

memadai juga turut berkontribusi pada masalah ini. Di banyak daerah pedesaan, misalnya, kekurangan guru perempuan yang terlatih serta fasilitas pendidikan yang ramah perempuan seperti ruang kelas yang aman dan nyaman menjadikan akses pendidikan semakin sulit bagi perempuan. Keterbatasan ini tidak hanya menghalangi perempuan dari mendapatkan pendidikan yang layak tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang telah berlangsung lama di Afghanistan. Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan perlu melibatkan perubahan budaya, kebijakan yang mendukung, dan investasi dalam infrastruktur pendidikan yang memadai (Putri et al., 2024).

Perbandingan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan di Swedia

Di Swedia, kebijakan pendidikan berfokus pada prinsip kesetaraan gender sebagai fondasi utama yang harus dijunjung tinggi. Pemerintah Swedia telah meluncurkan serangkaian inisiatif untuk memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan akses yang setara di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pengembangan kurikulum yang inklusif, yang dirancang untuk menghapus stereotip gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan guru yang berfokus pada kesetaraan gender, guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Melalui pelatihan ini, para guru dilatih untuk mengenali dan mengatasi bias gender dalam pengajaran, serta untuk menciptakan suasana kelas yang mendorong partisipasi aktif dari semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin (Olczyk et al., 2023).

Upaya ini telah membuahkan hasil yang sangat positif, terlihat dari peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pendidikan, terutama di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika). Bidang-bidang ini sebelumnya didominasi oleh laki-laki, namun kini perempuan semakin terlibat. Program-program seperti STEM for Girls telah dirancang khusus untuk menginspirasi dan mendorong perempuan muda untuk mengejar karir di bidang ini. Inisiatif ini tidak hanya memberikan informasi dan sumber daya yang diperlukan, tetapi juga menciptakan jaringan dukungan yang membantu perempuan dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi di sektor yang kompetitif ini. Hasil dari program-program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang memilih untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan karir di bidang STEM. Misalnya, dalam beberapa tahun

terakhir, ada lonjakan jumlah perempuan yang mendaftar di program-program universitas terkait STEM, yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender tidak hanya memengaruhi akses pendidikan, tetapi juga membantu menciptakan generasi perempuan yang siap bersaing dan berkontribusi di bidang teknologi dan sains (Moh Rosyid, 2021).

Kebijakan Pendidikan di Afghanistan

Sebaliknya, kebijakan pendidikan di Afghanistan sering kali mencerminkan sifat diskriminatif dan tidak mendukung perempuan. Selama pemerintahan Taliban, perempuan hampir sepenuhnya dilarang mengakses pendidikan, yang menyebabkan generasi perempuan kehilangan kesempatan belajar dan berkembang secara signifikan. Meskipun terdapat beberapa upaya perbaikan dalam kebijakan pendidikan setelah jatuhnya rezim Taliban, tantangan struktural dan budaya yang mendalam masih terus menghambat kemajuan yang diharapkan. Banyak kebijakan pendidikan yang ada tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, yang menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dalam akses pendidikan. Regulasi yang ketat dan ketidakjelasan dalam kebijakan pendidikan sering kali menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi perempuan yang ingin mengejar pendidikan. Misalnya, di banyak daerah, sekolah-sekolah tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk pendidikan perempuan. Hal ini termasuk kekurangan ruang kelas yang aman dan nyaman, yang sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif (Olczyk et al., 2023).

Selain itu, banyak sekolah kekurangan guru perempuan yang terlatih, yang dapat memberikan dukungan dan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa perempuan. Ketidakmampuan untuk menghadirkan model peran perempuan di dalam lingkungan pendidikan ini memperburuk situasi, karena banyak perempuan merasa tidak terwakili dan terasing dari proses belajar. Situasi ini diperburuk oleh norma sosial dan budaya yang menganggap pendidikan perempuan tidak penting, sehingga mengakibatkan penurunan partisipasi perempuan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk memperbaiki kebijakan pendidikan pasca-Taliban, struktur yang ada masih perlu mengalami perubahan mendasar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan inklusif bagi perempuan. Upaya reformasi harus fokus pada pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan memastikan keberadaan guru perempuan untuk

menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa (Olczyk et al., 2023).

Kualitas Pendidikan dan Hasil Belajar

Kualitas pendidikan di Swedia terbukti lebih unggul dibandingkan di Afghanistan. Indeks PISA menunjukkan bahwa siswa di Swedia, termasuk perempuan, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membaca, matematika, dan sains. Dalam studi ini, diperoleh data bahwa 85% perempuan di Swedia menyatakan puas dengan kualitas pendidikan yang diterima, sedangkan di Afghanistan, hanya 40% perempuan yang merasa puas, dengan banyak dari mereka mengalami kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh perempuan di kedua negara (Barra et al., 2024).

Peran Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan di Swedia telah menunjukkan hasil yang sangat positif dalam usaha mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan. Berbagai program telah dirancang untuk mendukung partisipasi perempuan, termasuk penyediaan beasiswa yang membantu mengurangi beban finansial bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Selain itu, ada juga pelatihan khusus yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan perempuan di bidang-bidang yang kurang diminati, seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong minat perempuan dalam bidang-bidang tersebut, tetapi juga untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks (Dessy et al., 2023).

Di sisi lain, situasi di Afghanistan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi pendidikan setelah periode pemerintahan Taliban, masih ada berbagai peraturan dan norma sosial yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan. Ini terutama terlihat di daerah-daerah terpencil, di mana faktor-faktor seperti tradisi budaya, ketidakamanan, dan kurangnya infrastruktur pendidikan menjadi penghalang besar. Dalam banyak kasus, keluarga masih merasa ragu untuk mengizinkan anak perempuan mereka bersekolah karena risiko yang ada dan anggapan bahwa pendidikan

perempuan tidak penting. Keterbatasan ini mengakibatkan perempuan di Afghanistan menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang sangat berbeda dengan kondisi di Swedia. Upaya yang lebih terarah dan sistematis diperlukan di Afghanistan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya setempat. Membangun kesadaran dan dukungan komunitas terhadap pentingnya pendidikan perempuan juga merupakan langkah krusial dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan ramah bagi perempuan yang ingin mengejar pendidikan (Dessy et al., 2023).

Diskusi

Implikasi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini menyoroti betapa pentingnya mengadopsi kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan yang efektif harus dirumuskan dengan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan sosial, budaya, dan politik yang sering kali menghalangi akses pendidikan bagi perempuan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang norma-norma budaya yang menganggap pendidikan perempuan kurang penting, serta tantangan struktural yang dihadapi oleh perempuan, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai dan ketidakamanan (Zaitun Qamariah, 2024).

Dalam konteks ini, model kebijakan yang diterapkan di Swedia, yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, dapat menjadi acuan yang berharga bagi negara-negara lain, termasuk Afghanistan. Swedia telah berhasil mengembangkan program-program yang tidak hanya menjamin akses yang setara bagi perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan inklusif. Pendekatan ini mencakup penyediaan beasiswa, pelatihan guru, serta program mentoring yang secara khusus ditujukan untuk perempuan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan minat dan partisipasi perempuan dalam bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki (Zaitun Qamariah, 2024).

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip serupa, negara-negara yang berjuang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dapat mulai merancang kebijakan yang

lebih sensitif terhadap konteks lokal mereka. Ini akan melibatkan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penguatan infrastruktur pendidikan, dan pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi perempuan di setiap komunitas. Selain itu, penting juga untuk menciptakan kesadaran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat terhadap pendidikan perempuan, sehingga setiap kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas (Hapsoro et al., 2021)

Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Internasional

Masyarakat sipil dan organisasi internasional memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung pendidikan perempuan di negara-negara berkembang. Dukungan yang diberikan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, pembiayaan, dan advokasi—sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan. Tanpa adanya dukungan ini, banyak perempuan yang mungkin terpaksa mengabaikan kesempatan pendidikan mereka akibat berbagai hambatan yang ada. Namun, penting untuk diingat bahwa intervensi ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap komunitas agar dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Misalnya, program pelatihan untuk guru perempuan harus mempertimbangkan norma-norma budaya setempat dan melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan dari komunitas (Ho et al., 2020).

Kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan perempuan. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan komprehensif. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi yang mendukung, sementara organisasi internasional dan masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan pelatihan, dukungan finansial, dan advokasi yang diperlukan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan. Dengan menciptakan sinergi antara semua pemangku kepentingan ini, diharapkan akan tercipta ekosistem pendidikan yang tidak hanya mendukung partisipasi

perempuan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Langkah-langkah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang (Nurhayati & , Langlang Handayani, 2020).

Pengaruh Kebijakan Terhadap Kesenjangan Gender

Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender di Swedia menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai kesetaraan akses pendidikan bagi semua individu. Pemerintah Swedia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pengembangan karir. Berbagai kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan inklusi di semua tingkatan pendidikan, khususnya dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), telah menghasilkan perempuan yang tidak hanya terdidik dengan baik, tetapi juga memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Kebijakan ini mencakup penyediaan beasiswa, program pelatihan, dan dukungan mentor yang secara khusus ditujukan untuk perempuan, sehingga mereka termotivasi untuk mengejar studi di bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Hasilnya, perempuan di Swedia tidak hanya mampu mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga menembus batasan-batasan tradisional dalam dunia kerja, berkontribusi secara signifikan terhadap inovasi dan perkembangan ekonomi (Moh Rosyid, 2021).

Di sisi lain, Afghanistan menghadapi tantangan serius dalam hal implementasi kebijakan pendidikan yang efektif dan inklusif. Meskipun terdapat beberapa kemajuan pasca-rezim Taliban, seperti upaya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan perempuan, kekuatan tradisional dan norma budaya patriarkal yang masih mengakar dengan kuat terus menjadi penghambat utama. Dalam banyak komunitas, pandangan bahwa pendidikan perempuan kurang penting atau bahkan berbahaya masih dominan, sehingga menghalangi akses perempuan ke pendidikan yang layak. Selain itu, banyak perempuan yang berusaha melanjutkan pendidikan mereka sering kali menghadapi ancaman keamanan, intimidasi, dan kekerasan, yang semakin memperumit situasi. Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan, tantangan struktural dan budaya yang mendalam masih menghalangi penciptaan

kesetaraan dalam pendidikan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap konteks lokal untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, agar perempuan di Afghanistan dapat menikmati hak pendidikan yang setara dan mencapai potensi penuh mereka (Ho et al., 2020).

Peran Budaya dan Normatif dalam Pendidikan

Konstruksi sosial dan budaya memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Di Afghanistan, norma-norma patriarkal yang mengakar dalam masyarakat secara signifikan menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yang mengakibatkan pembatasan akses mereka terhadap pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa di banyak daerah pedesaan, pandangan bahwa pendidikan perempuan kurang penting dibandingkan dengan peran mereka dalam mengurus rumah tangga sangat mendominasi. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dianggap lebih baik jika fokus pada tugas domestik, sementara pendidikan dianggap sebagai prioritas yang lebih rendah. Sebaliknya, di Swedia, budaya yang mengedepankan kesetaraan gender menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi perempuan untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Di negara ini, perempuan dipandang sebagai bagian integral dari perkembangan sosial dan ekonomi, sehingga kebijakan dan program pendidikan dirancang untuk mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam semua bidang, termasuk di sektor publik dan profesional. Ini menciptakan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi dan berkontribusi secara signifikan di berbagai sektor (Desi, 2022)

Dalam konteks Swedia, dukungan dari masyarakat dan institusi terhadap kesetaraan gender mendorong perempuan untuk meraih ambisi mereka tanpa batasan yang ditetapkan oleh norma-norma tradisional. Dengan adanya kebijakan yang inklusif dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan, Swedia berhasil menciptakan atmosfer pendidikan yang tidak hanya memperhatikan kesetaraan akses, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki semua alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk sukses dalam pendidikan dan karir. Perbedaan mencolok antara kedua negara ini menunjukkan betapa pentingnya konstruksi sosial dan budaya dalam menentukan tingkat kesetaraan gender dalam pendidikan (Hapsoro et al., 2021).

Peran Internasional dalam Memperbaiki Akses Pendidikan

Dukungan internasional, termasuk bantuan keuangan dan program reformasi kebijakan,

memainkan peran yang sangat krusial dalam membantu negara-negara seperti Afghanistan mengatasi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Bantuan ini sering kali sangat diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, memberikan akses ke sumber daya, dan mendanai program-program yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Namun, meskipun dukungan ini memberikan manfaat yang signifikan, tantangan struktural yang lebih dalam, seperti norma sosial yang mengakar dan dinamika politik yang mendominasi, tetap menjadi rintangan besar yang sulit diatasi. Dalam banyak kasus, norma-norma sosial yang konservatif masih memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk belajar. Ini termasuk anggapan bahwa pendidikan perempuan tidak seberharga pendidikan laki-laki, atau bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada peran domestik daripada pendidikan formal. Dalam konteks ini, dukungan internasional yang tidak diimbangi dengan upaya lokal untuk merubah pola pikir dan kebijakan yang ada mungkin tidak cukup untuk mencapai perubahan yang berarti (Meoli et al., 2024).

Keberhasilan Swedia dalam mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan menawarkan pelajaran penting bahwa dukungan internasional perlu dipadukan dengan inisiatif lokal yang dirancang untuk mengubah norma-norma sosial dan kebijakan yang ada. Di Swedia, kebijakan pendidikan yang inklusif dan program-program yang memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat telah membantu menciptakan lingkungan yang mendukung akses pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu, untuk negara-negara yang berjuang dengan ketidaksetaraan pendidikan, penting untuk mengembangkan strategi yang melibatkan kolaborasi antara dukungan internasional dan inisiatif lokal. Ini termasuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat, pendidik, dan organisasi perempuan, untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, hanya melalui pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat diatasi secara efektif (Meoli et al., 2024).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan di Swedia dan Afghanistan mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan

kebijakan, norma sosial, dan struktur pendukung yang ada di kedua negara. Swedia, dengan kebijakan pendidikan inklusif dan berfokus pada kesetaraan, berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang setara, di mana perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan berkualitas dan berpartisipasi dalam pasar kerja formal. Partisipasi perempuan yang tinggi di Swedia tidak hanya mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan, tetapi juga memperkuat kontribusi perempuan dalam ekonomi dan bidang-bidang kepemimpinan.

Sebaliknya, di Afghanistan, hambatan budaya, agama, politik, dan sosial yang kuat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Kesenjangan gender di bidang pendidikan ini berdampak negatif pada partisipasi perempuan dalam ekonomi formal dan memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Upaya reformasi pendidikan di Afghanistan menghadapi tantangan signifikan, meskipun adanya dukungan dari lembaga internasional untuk mendorong perubahan.

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan secara efektif, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup reformasi sosial, ekonomi, dan politik, serta dukungan kebijakan yang mempromosikan pendidikan inklusif. Kesetaraan gender dalam pendidikan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di setiap negara.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan:

1. **Adopsi Kebijakan Pendidikan Berbasis Gender:** Pemerintah perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang secara khusus mendukung akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Ini termasuk menghilangkan regulasi yang diskriminatif dan memastikan bahwa semua kebijakan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan perempuan.
2. **Program Peningkatan Kesadaran:** Meluncurkan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ini dapat mencakup kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, media, dan pemimpin agama untuk mengubah pandangan negatif terhadap pendidikan perempuan.

3. **Dukungan Infrastruktur Pendidikan:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan yang ramah perempuan, termasuk penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman untuk belajar. Fasilitas ini harus memenuhi kebutuhan khusus perempuan, seperti ruang yang terpisah untuk menjaga privasi dan kenyamanan.
4. **Pelatihan dan Dukungan untuk Guru:** Menyediakan pelatihan khusus bagi guru agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Pelatihan ini harus mencakup teknik pengajaran yang sensitif terhadap gender dan pengembangan kurikulum yang mengedepankan kesetaraan.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan kesenjangan gender dalam pendidikan dapat berkurang dan perempuan di negara-negara seperti Afghanistan dapat memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Upaya ini akan menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2021). *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Asniah, A., Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). *Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam*. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(1), 23-34.
- Barra, C., Grimaldi, M., Muazzam, A., Troisi, O., & Visvizi, A. (2024). *Digital divide, gender gap, and entrepreneurial orientation: How to foster technology adoption among Pakistani higher education students? Socio-Economic Planning Sciences*, 93(April), 101904. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101904>
- Damanik, F. H. S., & Saliman. (2024). *Menanamkan Nilai Kesetaraan Gender dalam Hubungan Berpacaran melalui Pembelajaran Sosiologi di Jenjang Sekolah Menengah Atas*. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 771–778. <https://doi.org/10.58230/27454312.376>
- Desi, P. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Dessy, S., Tiberti, L., & Zoundi, D. (2023). *The gender education gap in developing countries: Roles of income shocks and culture*. *Journal of Comparative Economics*, 51(1), 160–

180. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.11.002>
- Guo, H., Hu, C., & Ding, X. (2022). Son preference, intrahousehold discrimination, and the gender gap in education in China. *International Review of Economics and Finance*, 79(January), 324–339. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.007>
- Hapsoro, M. R. A., Suyitno, S., & Zulianto, S. (2021). Ketidakadilan Gender Dan Nilai Pendidikan Karakter Dalam Teks Drama Sampek Engtay Serta Pemanfataannya Dalam Pembelajaran Sastra Di Sma. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 9(2), 408. <https://doi.org/10.20961/basastra.v9i2.52473>
- Ho, M. T., La, V. P., Nguyen, M. H., Pham, T. H., Vuong, T. T., Vuong, H. M., Pham, H. H., Hoang, A. D., & Vuong, Q. H. (2020). An analytical view on STEM education and outcomes: Examples of the social gap and gender disparity in Vietnam. *Children and Youth Services Review*, 119(August), 105650. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105650>
- Julianti, A., Ete, E. V., Puspita, E. S. I. M., Sallalu, A. R. H., & Ramadhani, U. E. (2022). Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama" Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki". *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Kentmen-Cin, C., Akbaba, Y., & Saracoglu, B. (2024). Turkey's gender gap in higher education: An analysis of IR doctoral students. *Women's Studies International Forum*, 102(156), 102863. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102863>
- Lomotey, B. A., Csajbok-Twerefou, I., Husein, A. A. R., & Diabah, G. (2023). The gender enrolment gap in foreign language education revisited: Contemporary issues in a Ghanaian higher education institution. *System*, 117(November 2022), 103110. <https://doi.org/10.1016/j.system.2023.103110>
- Meoli, A., Piva, E., & Righi, H. (2024). Missing women in STEM occupations: The impact of university education on the gender gap in graduates' transition to work. *Research Policy*, 53(8). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2024.105072>
- Moh Rosyid. (2021). Pendidikan Integral Berbasis Karakter. *Jurnal Perspektif*, 14(2), 250–266.
- Novitasari, N., & Lestari, S. L. (2023). Evaluasi Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Manusia: Studi Kasus Ipm Dan Ipg Di Provinsi Bali Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah*

- Dinamika Sosial*, 7(2), 153–173. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4675>
- Nurhayati, H., & , Langlang Handayani, N. W. (2020). *Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu.* *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3(2), 524–532. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Olczyk, M., Gentrup, S., Schneider, T., Volodina, A., Perinetti Casoni, V., Washbrook, E., Kwon, S. J., & Waldfogel, J. (2023). *Teacher judgements and gender achievement gaps in primary education in England, Germany, and the US. Social Science Research*, 116(September), 102938. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102938>
- Palomares-Ruiz, A., Cebrián-Martínez, A., García-Toledano, E., & López-Parra, E. (2021). *Digital gender gap in university education in Spain. Study of a case for paired samples. Technological Forecasting and Social Change*, 173. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121096>
- Plaza-Angulo, J. J., & López-Toro, A. A. (2024). *The perception of transversal skills among students of business administration: Gender gap. Service-learning, gender and skills in higher education. International Journal of Management Education*, 22(2). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.100970>
- Putri, A. S., Mutmainna, A. Z., Wardoyo, H. F., & Febriansyah, M. R. (2024). *Official Development Assistance (Oda) Kanada Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Dan Memperkuat Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang Dan Afrika Tahun 2018-2022. BHUVANA: Journal of Global Studies*, 2(1), 1–30. <https://doi.org/10.59408/bjgs.v2i1.147>
- Rahmawati, D., Thahir, A. H., Robingaton, R., & Hafil, A. S. (2023, October). *Ketidaksetaraan Gender dalam Kajian Tasawuf. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 29, pp. 115-122)*.
- Safitri, A. N., Fatah, M. A., Azizah, N. N., & Zakiah, S. A. (2021). *Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan perspektif agama Islam. Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(3), 128–132. <https://doi.org/10.22219/jppg.v2i3.23975>
- Setyawan, B. (2019). *Penyetaraan Gender di Sri Lanka: Konflik Macam Tamil sebagai Tantangan Program UNDP. Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 74–93. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i1.724>
- Shamimi, Z., & Rijal, N. K. (2022). *Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)*.

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 3(1), 1.
<https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.31062>

Svensson, H. (2024). *Language learning, gender and education: Understanding the agency and affordances of refugee-background women with emergent literacy*. *Linguistics and Education*, 81(November 2023), 101309. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2024.101309>

Tjalau, C. A., Gazali, I., & Sarif, S. (2023). *Assuthur: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*. 2(2).

Wu, M., Yu, Q., Li, S. L., & Zhang, L. (2022). *Geographic and gender disparities in global education achievement during the COVID-19 pandemic*. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 111(January), 102850. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102850>

Zaitun Qamariah. (2024). *Analisis Dinamika Kesetaraan Gender dalam Pengajaran Bahasa Inggris*. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(1), 202–220. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i1.1373>